

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN MAMASA TAHUN 2025**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan	1 Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,36	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>dimana: HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t = Usia (a, a + 1, ..., n) FK = Faktor koreksi pesantren</p>	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang di harapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	BPS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2 Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,46	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>dimana : RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p>	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang) cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk usia 25 tahun keatas dengan asumsi pada umur 25 tahun prosese pendidikan sudah berakhir	BPS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	3 Angka Harapan Hidup	Tahun	71,65	Angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuatkan tabel kematian	Usia harapan hidup adalah jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah dimasa mendatang	BPS	Dinas Kesehatan
			4 Prevalensi Stunting	Pesen	20,00	Jumlah Balita dengan Panjang Badan/Tinggi Badan Menurut usia Dibawah -2 Standar Devisiasi pada Kurva pertumbuhan WHO Dibagi Jumlah Keseluruhan Balita X 100	Jumlah Balita dengan (tinggi badan/umur) di bawah -2 Standar devisiasi di Mamasa dibandingkan dengan jumlah balita yang diukur keseluruhan di Mamasa	SSGI (Kemenkes RI)	Dinas Kesehatan
		3 Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat	5 Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial	Pesen	88	Rata-rata Persentase Perlindungan Jaminan Sosial		Data OPD Diolah (Satpol PP, DP3A, Dinas Sosial)	Bappeda Litbangda

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
							Jumlah Masyarakat yang Mendapat Jaminan Sosial dari APBD/APBN di Bagi Jumlah Masyarakat Miskin yang Wajib Mendapat Perlindungan Sosial X 100	Data OPD Diolah	Dinas Sosial		
							Jumlah Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan yang Ditangani dibagi Jumlah Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan yang Terjadi di Tahun n X 100	Data OPD Diolah	Dinas PPPA dan Dinas Sosial		
							Jumlah Kasus Kebakaran yang Ditangani dalam Jangka Waktu 15 Menit dibagi total Kejadian Kebakaran X 100	Data OPD Diolah	Satpol PP		
2	Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	4	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam Mendukung Perekonomian Daerah	6	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Persen	39,80	$\frac{\text{PDRB Sektor Pertanian}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$	Perbandingan antara jumlah PDRB yang berasal dari sektor Pertanian dengan Total PDRB	BPS	Dinas Pertanian
		5	Meningkatnya Investasi Sektor Pariwisata, Industri dan Perdagangan Berbasis Potensi Unggulan Daerah	7	Persentase Pendapatan Urusan Pariwisata Terhadap PAD	Persen	0,0010	$\frac{\text{Jumlah Capaian PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$	perbandingan antara jumlah PAD yang berasal dari sektor pariwisata dengan total PAD	Bidang Pengembangan Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata
				8	Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan Terhadap PDRB	Persen	5,65	$\frac{\text{PDRB Sektor Industri}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$	Perbandingan antara jumlah PDRB yang berasal dari sektor industri dengan Total PDRB	BPS	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
				9	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	14,80	$\frac{\text{PDRB Sektor Perdagangan}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$	Perbandingan antara jumlah PDRB yang berasal dari sektor Perdagangan dengan Total PDRB	BPS	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		6	Meningkatnya Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,01	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Perbandingan antara jumlah pengangguran terhadap Jumlah Angkatan Kerja	BPS	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		7	Meningkatnya Infrastruktur untuk Menunjang Pelayanan Publik	11	Kontribusi Sektor Kontruksi terhadap PDRB	Persen	90,10	$\frac{\text{PDRB Sektor Konstruksi}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$	Perbandingan antara jumlah PDRB yang berasal dari sektor Konstruksi dengan Total PDRB	BPS	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	8	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	12	Nilai Sakip	Point/Kategori	B	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP KemenPAN-RB	Hasil Evaluasi SAKIP Kemenpan RB	KemenPAN RB	Bagian Organisasi dan Tatalaksana
				13	Opini BPK	Kategori	WTP	Opini BPK terhadap LKPD	Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan	BPK RI	Badan Pengelola Keuangan Daerah
		9	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	14	Indeks SPBE	Point	2,3	$\text{Indeks Domain}_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$ <p>dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ND_j adalah nilai indeks domain ke-j; • BD_j adalah nilai bobot domain ke-j. 	Masing-masing nilai Indeks tersebut dihitung secara agregat dari nilai tingkat kematangan indikator. Perhitungan nilai indeks aspek, indeks domain, dan indeks SPBE diformulasikan dan telah tertuang pada masing-masing pedomannya, baik pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 & Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 tahun 2020. Kemudian nilai indeks yang diperoleh dari hasil pemantauan dan Evaluasi SPBE merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE yang dikelom.pokkan berdasarkan predikat.	KemenPAN RB	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
				15	Nilai Inovasi Daerah	Kategori	Inovatif	$\frac{\text{Total Skor}}{\text{Total Skor Maksimal}} \times 100\%$	Pengukuran dan penilaian terhadap inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pemberian skor terhadap inovasi yang dilakukan	Bappenas	Bappelitbangda
4	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	10	Meningkatnya Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	16	Cakupan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungn Hidup	Persen	32,2	Jumlah Intervensi Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan dibagi dengan Total Pengelolaan dan pengendalian yang Wajib di Intervensi (Air, Udara dan	Jumlah pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum yang telah dilakukan terhadap Total Pengelolaan yang seharusnya	DLHK	DLHK

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11 Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	17 Indeks Resiko Bencana	Kategori	Sedang	Risiko = <u>Bahaya X Kerentanan</u> Kapasitas	Indeks resiko bencana menunjukkan tingkat resiko bencana di setiap wilayah, baik di tingkat kabupaten maupun kota	BNPB	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Mamasa, Januari 2025

PJ. BUPATI MAMASA

